

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Permasalahan utama yang banyak dihadapi oleh banyak negara khususnya negara berkembang adalah permasalahan yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi. Secara umum pembangunan ekonomi dapat diartikan sebagai upaya untuk meningkatkan pendapatan perkapita yang terjadi secara terus menerus dalam jangka panjang (Hidayat, Lesmana, & Latifah, 2022). Pembangunan ekonomi ini menjadi sebuah hal yang difokuskan oleh pemerintah daerah setempat untuk menciptakan pemerataan ekonomi.

Menurut Todaro & Smith (2015) yang menyatakan bahwa tujuan utama pembangunan ekonomi adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pertumbuhan, pemerataan, dan pengentasan kemiskinan, meskipun dalam kenyataannya ketiga tujuan ini sering belum tercapai secara merata. Pada proses untuk mencapai tujuan pembangunan ekonomi yang diinginkan negara harus mengenali permasalahan ekonomi yang ada di negara tersebut (Salsavira & Setiawati, 2025)

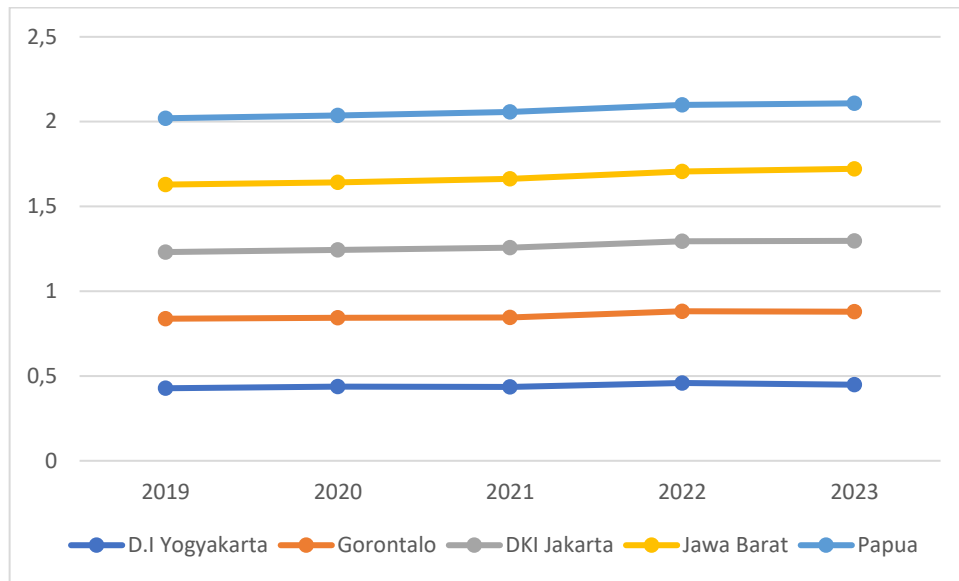
Menurut World Bank, (2020) tidak meratanya distribusi pendapatan merupakan salah satu masalah yang cukup sering dihadapi oleh beberapa negara khususnya negara-negara berkembang . Ketika pendapatan tidak terdistribusi secara merata, maka akan muncul kesenjangan sosial dan ekonomi yang dapat menghambat tercapainya keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh (Sholikah & Imaningsih, 2022).

Menurut Todaro & Smith (2015) Ketimpangan pendapatan adalah perbedaan dalam distribusi pendapatan antar individu atau rumah tangga dalam suatu perekonomian. Dengan kata lain, tidak semua individu atau rumah tangga memiliki kesempatan yang sama dalam memperoleh penghasilan yang layak. Ketimpangan ini sering muncul sebagai akibat dari perbedaan tingkat pembangunan dan akses terhadap sumber daya ekonomi yang tidak merata (Simalango & Ririt Iriani, 2024). Hal tersebut menimbulkan kesenjangan yang semakin melebar antara kelompok masyarakat tertentu maupun antarwilayah.

Pada dasarnya ketimpangan pendapatan merujuk pada kondisi di mana munculnya permasalahan akibat kesenjangan pendapatan kelompok masyarakat antar daerah maju dengan daerah yang tertinggal (Ati et al., 2024) . Ketimpangan pendapatan yang semakin tinggi akan menimbulkan dampak negatif serta menimbulkan sejumlah masalah seperti meningkatnya jumlah kriminalitas dan tingginya angka kemiskinan.

Fenomena ketimpangan pendapatan masih menjadi permasalahan yang sulit diatasi, terutama di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Masalah ini terlihat dari adanya perbedaan antara masyarakat yang berpenghasilan tinggi dengan masyarakat yang berpenghasilan rendah. Sebagian kecil masyarakat dapat menikmati fasilitas pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan yang layak, sementara sebagian lainnya masih berjuang untuk memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari. Ketimpangan pendapatan terjadi di hampir seluruh wilayah Indonesia dengan tingkat yang bervariasi, mulai dari rendah, sedang, hingga tinggi (Badan Pusat Statistik, 2024)

Grafik 1.1 Provinsi dengan Indeks Gini Tertinggi Tahun 2019 - 2023



Sumber : Badan Pusat Statistik Daerah Istimewa Yogyakarta, oleh penulis

Berdasarkan grafik 1.1 menunjukkan data 5 Provinsi dengan nilai ketimpangan pendapatan (diukur dengan gini ratio) tertinggi pada wilayah pedesaan dan perkotaan di Indonesia pada tahun 2019 – 2023. Dapat diketahui bahwa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan provinsi dengan angka gini ratio tertinggi selama 5 tahun berturut-turut secara konsisten dibandingkan provinsi lain, yang menunjukkan bahwa distribusi pendapatan di wilayah ini relatif kurang merata.

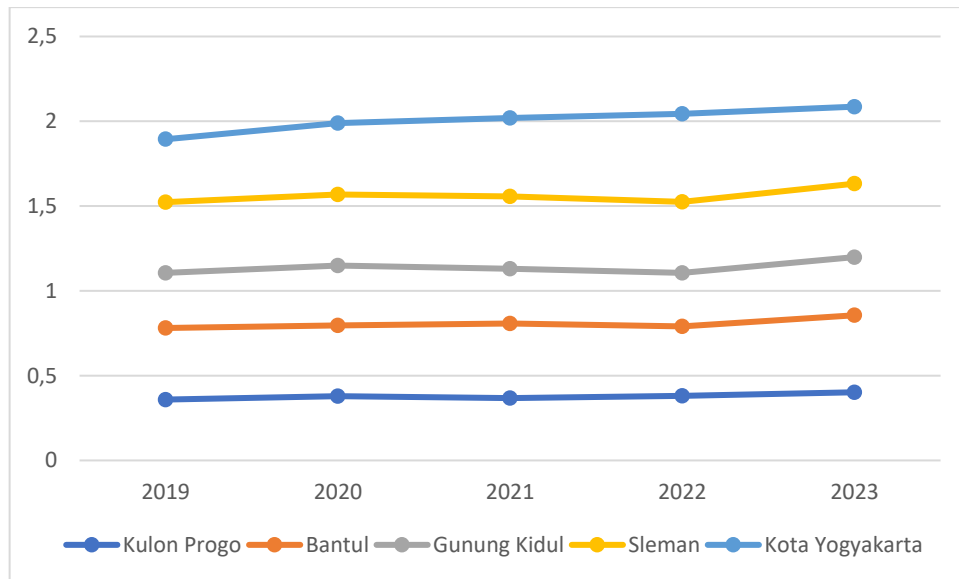
Dari grafik tersebut Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi Provinsi yang menarik untuk dikaji. Daerah Istimewa Yogyakarta dikenal sebagai kota pelajar dengan keberadaan berbagai institusi pendidikan tinggi dan provinsi dengan kualitas sumber daya manusia yang tinggi. Capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) DIY pada tahun 2023 sebesar 81,07 berada di atas rata-rata nasional yang sebesar 73,55. Provinsi DIY juga mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang

tergolong idealnya mampu menurunkan gini ratio. Namun, fakta tersebut tidak serta merta mencerminkan kondisi kesejahteraan masyarakat secara merata. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), DIY justru termasuk salah satu provinsi dengan tingkat ketimpangan pendapatan tertinggi di Indonesia, sebagaimana ditunjukkan oleh nilai Gini Ratio yang terus berada di atas angka 0,4 selama beberapa tahun terakhir. Ketika nilai koefisien gini suatu daerah mendekati 1 maka dari itu daerah tersebut semakin timpang (Andriyani & Wahyuni, 2022).

Menurut Sairi Hasbullah Deputy Bidang Statistik dalam Aliyah Izza Pradipta (2022) menyebutkan bahwa pengeluaran Daerah Istimewa Yogyakarta tidak merata karena penduduknya memiliki nilai konsumsi yang berbeda pula. Pada dasarnya rumah tangga miskin di Daerah Istimewa Yogyakarta akan cenderung sangat hemat dalam mengatur pengeluarannya. Sementara itu pada kelas menengah cenderung akan membelanjakan lebih banyak daripada kelas rumah tangga miskin. Sedangkan penduduk dengan kelas atas akan membelanjakan lebih banyak lagi jika dibandingkan dengan kelas menengah maupun kelas miskin. Situasi perekonomian masyarakat ini secara umum belum mencapai pada pemerataan pendapatan dan masih terdapat kesenjangan.

Hal tersebut menunjukkan bahwa pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta gagal dalam mencapai pemerataan pendapatan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat baik di Kota maupun Kabupaten. Dalam konteks tersebut artinya ketimpangan distribusi pendapatan masih tinggi antara wilayah perkotaan dan pedesaan, serta antar kabupaten/kota di provinsi ini.

Grafik 1.2 Indeks Gini Ratio Kabupaten/Kota Provinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta Tahun 2019 - 2023

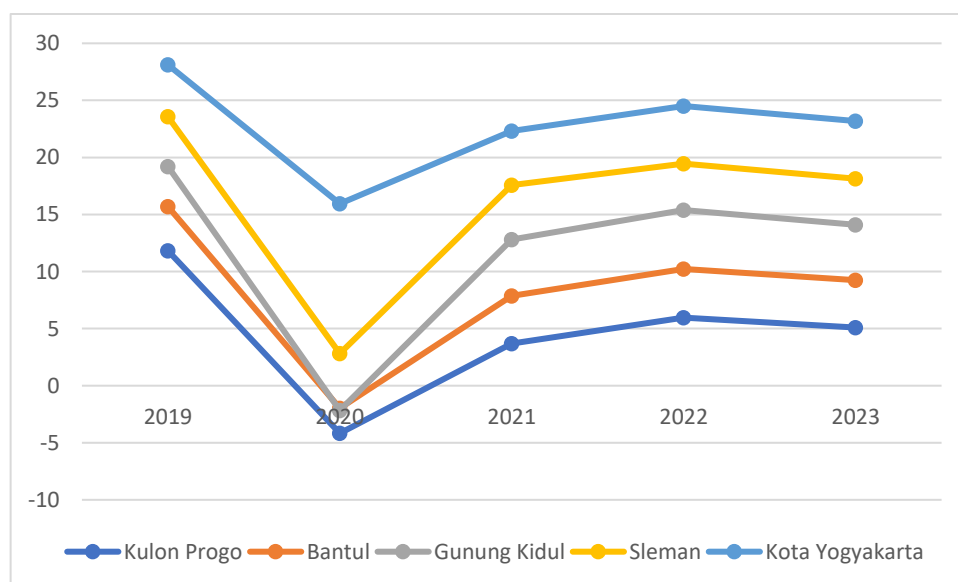


Sumber : Badan Pusat Statistik Daerah Istimewa Yogyakarta, oleh penulis

Berdasarkan grafik 1.2 menunjukkan ketimpangan pendapatan pada kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta yang disebabkan oleh perbedaan karakteristik wilayah, dan batas wilayah masing-masing. Selain itu, pembangunan yang cenderung terpusat pada daerah maju di mana aktivitas ekonomi dan infrastruktur lebih terkonsentrasi di Kota Yogyakarta dibandingkan dengan kabupaten-kabupaten seperti Kulon Progo, Gunungkidul, dan Bantul. Ketimpangan yang terjadi ini dapat memicu ketidakstabilan ekonomi serta berpotensi pada krisis keuangan. Selain itu, ketimpangan pendapatan juga dapat memperluas kesenjangan pendapatan antara kelompok masyarakat kaya dan kelompok masyarakat miskin, sehingga kemiskinan akan sulit diatasi dan akan menghambat pertumbuhan ekonomi serta dapat meningkatkan tingkat kriminalitas (Nilasari & Amelia, 2021).

Ketimpangan pendapatan disebabkan oleh beberapa faktor tidak hanya karena pembangunan yang tidak merata antar wilayah namun juga adanya perbedaan potensi sumber daya alam (SDA) dan kualitas sumber daya manusia (SDM) (Khuluk et al., 2021). Pada dasarnya terdapat berbagai faktor yang berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan salah satunya adalah pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut. Pertumbuhan ekonomi merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan kegiatan ekonomi yang dapat mendorong peningkatan pendapatan masyarakat. keberhasilan Pembangunan ekonomi dapat dilihat melalui pertumbuhan ekonomi daerah tersebut. Pertumbuhan ekonomi yang baik di suatu daerah menunjukkan keadaan masyarakat yang Sejahtera.

Grafik 1.3 Laju Pertumbuhan PDRB per Kapita Atas Dasar Harga Konstan 2010 di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun (persen) 2019 – 2023



Sumber : Badan Pusat Statistik Daerah Istimewa Yogyakarta, oleh penulis

Berdasarkan grafik 1.3 menunjukkan bahwa pada tahun 2019, seluruh wilayah mengalami pertumbuhan ekonomi positif dengan Kulon Progo mencatat

angka tertinggi sekitar 12%. Namun, pandemi COVID-19 pada 2020 menyebabkan kontraksi signifikan, di mana Kulon Progo mengalami pertumbuhan negatif sekitar -5%, sementara Kota Yogyakarta justru tumbuh tinggi sekitar 13% berkat faktor khusus. Pemulihan mulai terlihat pada 2021 dengan pertumbuhan merata di kisaran 4%–6%, dilanjutkan tren positif pada 2022, saat Sleman mencatat pertumbuhan tertinggi. Pada 2023, pertumbuhan ekonomi di seluruh wilayah cenderung stabil di angka 5%–6%. Secara umum, grafik ini memperlihatkan fluktuasi ekonomi yang cukup signifikan pada awal pandemi, diikuti dengan proses pemulihan yang bertahap dan konsisten dalam beberapa tahun terakhir.

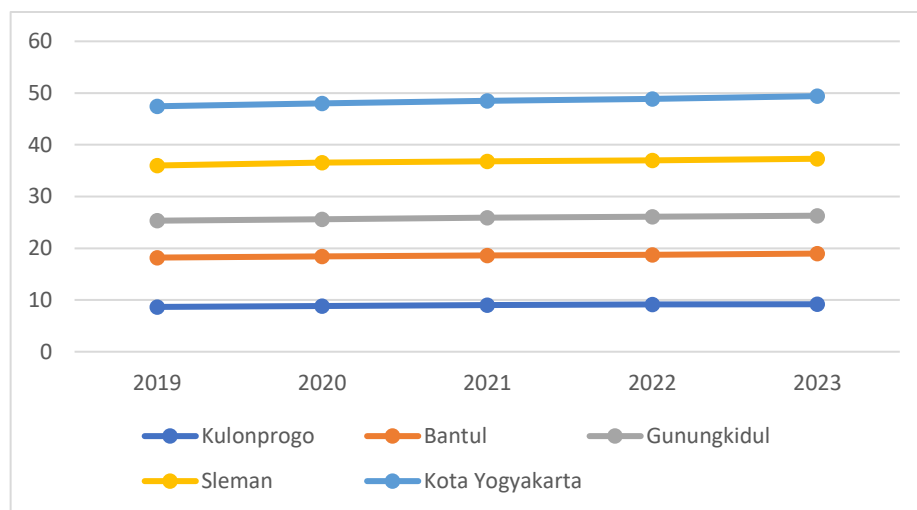
Berdasarkan hasil penelitian Alamanda (2021) yang meneliti pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan pendapat menemukan pengaruh yang positif antara variabel pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan. Artinya, meningkatnya pertumbuhan ekonomi dapat meningkatkan pendapatan, dimana semakin tinggi pertumbuhan ekonomi di daerah akan memiliki dampak yang semakin tinggi pula terhadap ketimpangan pendapatan. Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Febriyani & Anis (2022) menunjukkan adanya hubungan negatif antara pertumbuhan ekonomi dengan ketimpangan pendapatan.

Adanya pengaruh positif dan negatif antara pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan pendapatan menunjukan bahwa pertumbuhan ekonomi seringkali dapat berdampak baik dan buruk pada pemerataan distribusi pendapatan di setiap daerah. Hal ini sesuai dengan pernyataan Simon Kuznets (1955) dalam Todaro (2013) bahwa hubungan antara pertumbuhan ekonomi dengan ketimpangan pendapatan berbentuk huruf U terbalik, dimana awalnya peningkatan pertumbuhan ekonomi dapat meningkatkan ketimpangan pendapatan, namun setelah mencapai

kondisi tertentu meningkatnya pertumbuhan ekonomi justru akan menurunkan ketimpangan pendapatan.

Faktor lain yang berpengaruh pada ketimpangan pendapatan adalah rata-rata lama sekolah. Rata-rata lama sekolah merupakan faktor yang berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan. Pendidikan yang lebih tinggi berperan dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan individu, yang pada gilirannya membuka peluang lebih besar untuk memperoleh pekerjaan yang layak dengan penghasilan lebih tinggi. Sebaliknya, rendahnya rata-rata lama sekolah mencerminkan keterbatasan dalam pencapaian pendidikan, yang pada akhirnya mengurangi peluang individu untuk memperoleh pekerjaan layak dan turut memperbesar ketimpangan distribusi pendapatan (Duarsa & Wijaya, 2021).

Grafik 1.4 Perkembangan Rata – rata lama sekolah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (%) 2019 – 2023



Sumber : Badan Pusat Statistik Daerah Istimewa Yogyakarta, oleh penulis

Berdasarkan Grafik 1.4 menunjukkan bahwa perkembangan rata-rata lama sekolah masyarakat di kabupaten/kota Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan

bahwa secara umum terjadi pertumbuhan capaian pendidikan di masing-masing wilayah, meskipun besarnya perkembangan yang terjadi tidak sama. Namun, Kabupaten Gunungkidul mencatatkan tingkat perkembangan rata-rata lama sekolah yang relatif lebih rendah dibandingkan dengan wilayah lain seperti Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman, dan Kota Yogyakarta. Situasi ini dapat menunjukkan adanya perbedaan dalam laju peningkatan pencapaian pendidikan, dimana Kabupaten Gunungkidul masih tertinggal dalam pengembangan sumber daya manusia.

Data yang diolah dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa selama periode 2019–2023 terjadi perkembangan rata-rata lama sekolah di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Meskipun secara umum menunjukkan tren positif, perbedaan persentase perkembangan antarwilayah mengindikasikan bahwa peningkatan akses dan keberlanjutan pendidikan belum sepenuhnya merata. Oleh karena itu, pemerataan peningkatan pendidikan tetap menjadi tantangan penting bagi pemerintah daerah guna meminimalkan potensi ketimpangan antarwilayah.

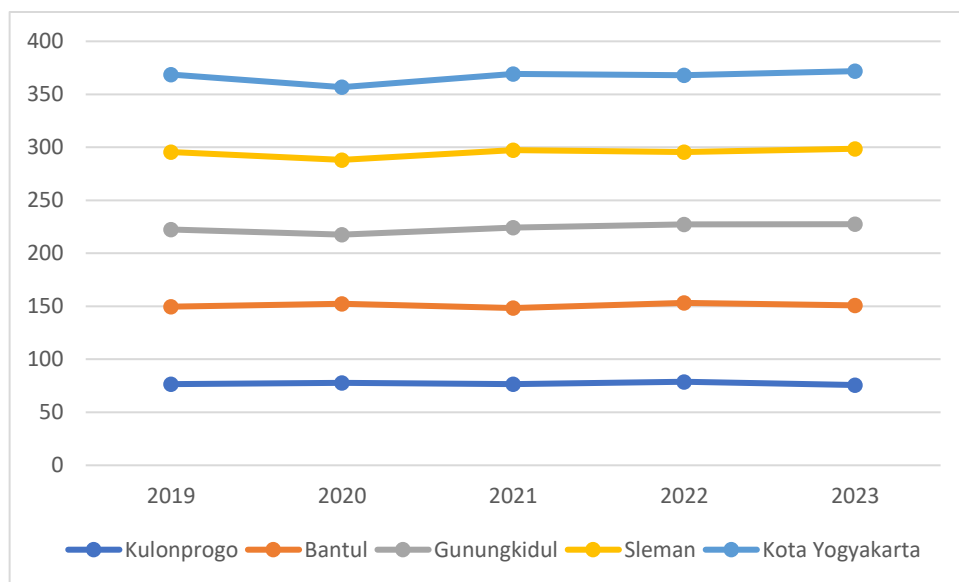
Menurut Gary S. Becker (dalam Zahrotussolichah, 2023), semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka semakin besar peluang untuk memperoleh pekerjaan dengan upah yang lebih baik. Dalam kaitannya dengan perkembangan rata-rata lama sekolah, semakin besar pertumbuhan pendidikan yang terjadi, maka semakin besar pula potensi peningkatan kualitas tenaga kerja. Namun, apabila perkembangan pendidikan tidak merata, hal ini dapat menyebabkan perbedaan pendapatan dan memperbesar ketimpangan. Selain itu, pendidikan berperan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di suatu daerah, sehingga diharapkan

mampu mendorong peningkatan pendapatan dan mengurangi kesenjangan pendapatan antar masyarakat. Upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia dapat ditempuh melalui berbagai langkah, salah satunya dengan meningkatkan mutu dan pemerataan pendidikan. Langkah tersebut diharapkan mampu mendorong tumbuhnya inisiatif dan kreativitas dalam menciptakan lapangan kerja baru.

Selain itu, faktor lain yang mempengaruhi ketimpangan pendapatan adalah tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK). TPAK mencerminkan besarnya proporsi penduduk usia kerja yang terlibat dalam pasar tenaga kerja. Tingginya TPAK seharusnya menjadi indikator positif, namun jika partisipasi kerja didominasi oleh pekerjaan informal, produktivitas rendah, dan tanpa perlindungan sosial, maka hal ini justru dapat memperkuat ketimpangan pendapatan (Wijayanti et al., 2023).

Grafik 1.5 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (persen) Daerah Istimewa

Yogyakarta 2019 - 2023



Sumber : Badan Pusat Statistik Daerah Istimewa Yogyakarta, oleh penulis

Berdasarkan grafik 1.4 menunjukkan bahwa secara umum, terlihat bahwa nilai indikator mengalami fluktuasi yang relatif stabil di masing-masing wilayah,

meskipun terdapat variasi antar daerah. Kulonprogo secara konsisten menunjukkan nilai tertinggi setiap tahunnya, dengan capaian di atas 80 pada tahun 2019 hingga 2022, meskipun sedikit menurun di tahun 2023. Hal ini mencerminkan konsistensi dalam peningkatan pembangunan atau kinerja wilayah. Gunungkidul memperlihatkan tren peningkatan yang signifikan dari tahun 2020 hingga 2022, yang mengindikasikan adanya perbaikan atau intervensi pembangunan yang cukup efektif, walaupun mengalami sedikit penurunan pada tahun 2023. Sementara itu, Bantul dan Sleman menunjukkan fluktuasi yang cenderung stabil tanpa peningkatan atau penurunan yang signifikan selama lima tahun terakhir. Kota Yogyakarta, meskipun merupakan pusat pemerintahan dan ekonomi, memiliki capaian yang sedikit lebih rendah dibandingkan Kulonprogo dan Gunungkidul dalam beberapa tahun terakhir.

Berdasarkan penelitian terdahulu oleh Zahrotussolichah (2023) menyatakan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi terbukti tidak berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan. Hasil tersebut menunjukkan bahwa peningkatan pertumbuhan ekonomi belum tentu diikuti dengan pemerataan pendapatan di masyarakat. Berbeda dengan penelitian Simalango & Iriani (2024) yang menyatakan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap ketimpangan pendapatan.

Selain pertumbuhan ekonomi, faktor pendidikan dan partisipasi tenaga kerja juga berperan penting dalam memengaruhi ketimpangan pendapatan. Pada penelitian Amalia (2020) menemukan bahwa variabel rata-rata lama sekolah berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendidikan. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan rata-rata lama sekolah tidak selalu diikuti dengan

pemerataan kualitas pendidikan di seluruh lapisan masyarakat. Sementara itu penelitian yang dilakukan oleh Nilasari & Amelia (2022) menunjukkan bahwa tingkat partisipasi angkatan kerja berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan.

Penelitian ini penting dilakukan karena ketimpangan pendapatan masih menjadi permasalahan serius di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta meskipun wilayah tersebut memiliki pertumbuhan ekonomi yang tergolong idealnya mampu menurunkan gini ratio. Namun, fakta tersebut tidak secara langsung menggambarkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat telah merata. Melalui penelitian ini pula, diharapkan dapat diketahui sejauh mana pertumbuhan ekonomi, rata-rata lama sekolah, dan partisipasi tenaga kerja berperan dalam memengaruhi distribusi pendapatan masyarakat serta dapat memberikan manfaat bagi seluruh pihak.

Berdasarkan uraian mengenai kondisi dan permasalahan yang telah dipaparkan, terdapat sejumlah faktor yang diduga menjadi penyebab terjadinya ketimpangan pendapatan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih dalam khususnya di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta terkait masalah dengan judul **"Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Rata-rata Lama Sekolah, dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Terhadap Ketimpangan Pendapatan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta"**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian permasalahan di atas, maka dapat dibuat rumusan masalah penelitian sebagai berikut :

1. Apakah pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ?
2. Apakah rata-rata lama sekolah berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ?
3. Apakah tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari uraian rumusan masalah diatas, dapat diketahui tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh rata-rata lama sekolah terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

1.4. Ruang Lingkup Penelitian

Berdasarkan uraian yang telah ditulis sebelumnya, penelitian ini memiliki batasan-batasan yang akan diteliti agar pembahasan dapat terfokus, diantaranya :

1. Penelitian ini mencakup penggabungan data cross-section yang meliputi kabupaten/kota yang ada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan

data time series dengan periode 2014 – 2023 di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Data didapatkan melalui website resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta berupa publikasi-publikasi resmi.

2. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu ketimpangan pendapatan yang diukur menggunakan gini rasio sebagai variabel dependen, sedangkan variabel pertumbuhan ekonomi, rata-rata lama sekolah, dan tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) sebagai variabel independent.

1.5. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan akan mampu memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini mampu menjelaskan dan melengkapi penelitian-penelitian sebelumnya serta dapat memberikan wawasan yang berkaitan dengan ketimpangan pendapatan agar dapat dijadikan referensi bagi peneliti selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Adanya penelitian ini diharapkan dapat digunakan pemerintah daerah dan pihak-pihak terkait sebagai bahan arah kebijakan ekonomi untuk Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta khususnya berhubungan dengan ketimpangan pendapatan agar dapat mengurangi permasalahan ketimpangan pendapatan.